

Presidential Threshold: Harapan dan Tantangan Bacalon Presiden 2024

Sumardi¹, Muhammad Lutfi², Mochamat Nurdin³, Baharuddin⁴

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail : sumardi1610@gmail.com¹, lutfigov@gmail.com², moch.nurdin@gmail.com³,
baharuddin110985@gmail.com⁴

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat kepuasan pemerintah sejauh ini dan bagaimana keniscayaan bakal calon pemimpin yang bakal bertarung pada hajatan pemilu tahun 2024 pendatang. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), diawali dengan pencarian artikel menggunakan kata kunci kebijakan pemerintah baik pada bidang ekonomi, hukum, sosial maupun dinamika demokrasi dan politik jelang pemilu 2024 pada database *Scopus* dan *Google Scholar* periode 2015-2022 kemudian direview berdasarkan empat tahap, antara lain: 1) Pencarian artikel, 2) Pemetaan topik diskusi, 3). Analisis topik, dan 4). Analisis lebih lanjut dengan dukungan data-data kredibel yang telah di publikasikan oleh lembaga-lembaga survei kredibel. Hasil kajian dan analisis menyimpulkan bahwa harapan untuk menghadirkan pemimpin masa depan masih menuai pesimisme, hal ini terjadi karena di dalam pembacaan publik terhadap kepuasan mereka mengenai kinerja pemerintah dalam hal ini kabinet Jokowi-Ma'ruf yang sudah perjalanan tahun ketiga saat ini dinilai mengalami kegagalan mengendalikan kebijakan pada sejumlah aspek, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan publik, dan investasi ekonomi, kemudian tantangan lainnya adalah distrupsi politik dan demokrasi adanya kebijakan *presidential threshold* bakal berdampak pada estafet kepemimpinan yang memiliki latar belakang dan jaringan oligarki sama seperti strategi politik yang telah dimainkan oleh elite dan partai politik selama ini. Sehingga harapan untuk memisahkan diri dari cengkeraman feodalisme pemimpin, liberalisasi ekonomi dan kapitalisasi investasi dan keluar menjadi bangsa dan negara yang lebih berkeadilan masih bersifat semu.

Kata Kunci: Presidential Threshold; Harapan-Tantangan; Bacalon Presiden

Abstract

This paper aims to analyze how the government's level of satisfaction has so far been and how the inevitability of prospective leaders who will compete in the 2024 election celebrations for newcomers. The methodology used in this study uses a library research approach, starting with a search for articles using the keywords of government policies in the fields of economics, law, social and democratic and political dynamics ahead of the 2024 elections in the Scopus and Google Scholar the 2015-2022 period and then reviewed based on four stages, including: 1) Search for articles, 2) Mapping discussion topics, 3). Topic analysis, and 4). Further analysis with the support of credible data that has been published by credible survey institutions. The results of the study and analysis concluded that the hope of bringing in future leaders still reaps pessimism, this happens because in public reading of their satisfaction with the government's performance, in this case the Jokowi-Ma'ruf cabinet, which is already in its third year, is currently considered to have failed to control the government. policy on a number of aspects, especially regarding the fulfillment of public needs, and economic investment, then another challenge is political and democratic disruption, the existence of a presidential threshold will have an impact on the leadership relay which has an oligarchic background and network similar to the political strategy played by elites and political parties. so far.

So that the hope to break away from the grip of the feudalism of the leadership, economic liberalization and capitalization of investment and exit into a nation and state that is more rational is still fictitious.

Keywords: Presidential Threshold; Expectations -Challenge; President Candidate

PENDAHULUAN

Kajian ini merangkat dari cara pandang, pengamatan objektif serta nomatif atas beragam implikasi-implikasi kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah terutama pemerintah pusat sehingga berpengaruh signifikan terhadap kondisi nasional, tidak hanya persoalan hukum, kesehatan, pendidikan, politik, dan sosial budaya, tetapi yang dinilai sangat mencengangkan masyarakat pada umumnya adalah dinamika atas kebijakan perekonomian nasional kurang proporsional terhadap kondisi pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Akibatnya adalah *distrust* oleh publik terhadap pemerintah termasuk ke Presiden cenderung stagnan bahkan menurun (Cornelia Evelin Cabui, 2022; Powell, 2021). Kondisi ini benar-benar memposisikan pemerintahan pada pilihan kelihatan sulit, di suatu sisi, berpikir terhadap pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, tetapi di sisi lain beban utang negara terhadap negara lain juga mengalami peningkatan, resesi ekonomi dan keuangan yang di alami oleh negara kemungkinan menjadi alasan fundamental sehingga kebijakan demi kebijakan lahir dan diterapkan tanpa memperhatikan asas proporsionalitas sehingga kerap muncul kritik dan kontraproduktif dari sejumlah kalangan dan publik pada umumnya (Hamdanny & Mukhtar, 2021).

Tahun 2022 sekarang ini, kebijakan negara dan kendali pemerintahan di bawah Presiden Jokowi dinilai oleh sejumlah kalangan mengalami kegagalan terhadap sejumlah aspek, terutam pada persoalan pengendalian ekonomi, kebijakan investasi pada bidang ekonomi disinyalir hanya menguntungkan dan berpihak pada golongan-golongan tertentu (LSI, 2022), kemudian anomali demokrasi dan perpolitikan nasional hampir keseluruhan menjadi kendali dan kuasa elite oligarki, salah satunya adalah kebijakan *Presidential Threshold* yang semakin menumbuhkan suburkan serta menguatkan partai-partai elite besar, seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan lainnya. Sehingga partai-partai kecil dan minim modal secara ekonomi tetapi memiliki ukuran SDM dan *bargaining position* yang berkualitas sulit untuk bersaing dalam era distrupsi hari ini (Barokah & Hertanto, 2022; Nainggolan, 2016; Prabowo,aaa 2021).

Anomali ini cenderung melahirkan pesimisme terhadap masa depan pemimpin yang lebih berorientasi terhadap kepentingan publik. Survei-Survei yang setiap saat dilakukan oleh Lembaga Survei resmi nasional terhadap elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah termasuk Presiden, pun kecenderungannya stagnan bahkan menurun (LSI, 2022). Ini menandakan bahwa kabinet kedua pemerintahan Jokowi kurang mampu menghadirkan dan meninggalkan *legacy* terhadap bangsa dan negara. Misalnya berkaca pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 pengamatan menarik untuk di analisis secara esensial bahwa Peningkatan partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di

tengah bahaya Covid-19 merupakan kelanjutan dari pada tren partisipasi yang stabil dalam pemilu di Indonesia (LSI, 2022).

Peningkatan ini bertolak belakang dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang justru sedang memburuk. Peningkatan ini tidak dipengaruhi oleh kondisi perkembangan Covid -19 yang sesungguhnya. Peningkatan justru terjadi di daerah-daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi (Bansal, 2020; Fasano et al., 2020; Zimmermann & Nkenke, 2020). Banyak penyelenggara pemilu dan kandidat dilaporkan telah terpapar virus. Membaiknya persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada dan kepercayaan pada pemerintah dalam penanganan pandemi mendukung meningkatnya partisipasi. Tetapi persepsi bukanlah penjelasan tunggal. Faktor-faktor yang menguat di tingkat lokal adalah penjelasan yang kuat untuk hal ini. Varian tingkat partisipasi yang berbeda-beda pada tiap daerah ditentukan oleh intensitas kompetisi dan isu politik lokal yang berkembang. Hal ini terkait erat dengan mobilisasi politik, karakter pemilih, dan maraknya politik uang. Riset ini menunjukkan gagalnya tesis linearitas partisipasi yang tinggi dengan tingkat kualitas demokrasi (Mukhlis, 2021; Nurmandi et al., 2021; Punomo, 2021). Model perilaku pemilih juga gagal menjelaskan mengapa di saat kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi, antusiasme pemilih justru meningkat. Dengan demikian tulisan ini mengajukan dua pertanyaan kunci pertama adalah seperti apa parameter dan tingkat kepuasan pemerintah sejauh ini ?, dan kedua adalah bagaimana kenicayaan bakal calon pemimpin yang bakal bertarung pada hajatan pemilu tahun 2024 mendatang ?.

LITERATUR REVIEW

Dinamika Pengelolaan Negara dalam Perspektif Ekonomi Politik

Gejala dan fenomena-fenomena negara dan pemerintahan hari ini sangat fundamental untuk segera di atasi, selain penegakan hukum, angka kriminal, beserta *distrust* lembaga penegak hukum dan pemerintah itu sendiri yang kian hari kian menurun. Kebijakan demi kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pun tak luput dari kontroversi. Bahkan di dalam pendekatan ekonomi politik diperoleh sebuah pemahaman akan adanya teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, *laizzes faire* dan sosialisme (Koch & Buch-Hansen, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi penacapaian ekonomi (Powell, 2021).

Artinya Ekonomi politik tidak hanya masalah sosial dan keterbelakangan, tetapi untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada penyelenggara negara (Koch & Buch-Hansen, 2021; Powell, 2021). Dengan bahasa yang lebih sederhana, (Kiky, 2018) ekonomi politik merupakan interrelasi di antara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi, sehingga pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, dimana instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* sistem politik melalui kebijakan atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Pendekatan

ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan *a way of acting*, sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut *a place to act*. Fase politik ekonomi sangat mempengaruhi paradigma para pengambil kebijakan. Persoalan kesejahteraan bangsa sangat ditentukan oleh peran negara beserta instrumen kebijakannya, di mana instrumen kebijakan ini tidak ada yang bebas nilai (Cornelia Evelin Cabui, 2022; Maslihan, 2017; Samosir & Novitasari, 2022). Kebijakan tersebut akan selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu, sehingga nilai inilah yang mempengaruhi cara berpikir dan kemudian berdampak pada tindakan yang akan diambil. Demikian pula dalam konteks negara, di mana negara akan bertindak sesuai dengan pandangan dan cara berpikir para pengambil kebijakan negara tersebut.

Maslihan, (2017) menyatakan bahwa masalah ekonomi merupakan masalah yang dapat dijadikan kompetisi antar negara, karena hubungan-hubungan bilateral antar negara masalah ekonomi lebih diperhitungkan daripada politik dan ideologi. Tetapi pernyataan ini tentu tidak berdiri tunggal, artinya setiap negara memiliki strategi berbeda dalam menentukan strategi pengendalian negara, Indonesia sendiri, memiliki kekuatan bilateral dan invertasi negara terutama kemampuan dalam mengonsolidasikan antara politik, ekonomi dan hukum. Uniknyanya adalah negara ini menerapkan sistem demokrasi dengan sistem multipartai tetapi di lain hal penetapan bakal Calon Presiden akan sangat ditentukan oleh batasan-batasan peroleh suara Partai dan Jumlah Perolehan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kerennanya (Muhammad Saad, 2021) menyebut bahwa idealnya prinsip negara demokrasi hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi ia menilai bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara adil bagi partai politik peserta Pemilu, untuk itu ia menawarkan pentingnya persamaan hak dalam penentuan ambang batas dengan tidak menghilangkan hak minoritas partai politik peserta dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential Threshold: Antara Disrupsi dan Keadilan Demokrasi

Bongkar pasang pejabat negara dari level kementerian hingga level pemerintah daerah, pun dinilai menjadi salah satu anomali dalam mengadirkan transformasi pemerintahan yang lebih berpihak teradap kepentingan publik. Anomali tersebut adalah bagian atas dampak kebijakan *presidential threshold* (Ansori, 2019; Hamdanny & Mukhtar, 2021; Listyaningsih et al., 2020; Muhammad Saad, 2021; Mukhtarrija et al., 2017). Sejumlah referensi dengan cukup hati-hati menyuguhkan penjelasan terkait *threshold*, karena memang memiliki varian beragam antara lain adalah *electoral threshold*, *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*. (Goris Seran, 2017) mendefinisikan *presidential threshold* sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Penerapan *presidential threshold* pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sekarang tidak berlaku lagi. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, pengaturan *presidential threshold* terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pasangan calon

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dua puluh persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya (Mukhtarrija et al., 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Namun berbeda dalam *dissenting opinion* dinyatakan bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menjadi sulit dibantah bahwa pesan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terang-terangan diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo hanya sampai pada kalimat syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Padahal, dengan adanya frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan constitutional rights dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa format atau constitutional design atau constitutional engineering menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu (Ansori, 2019; Gobel, 2019; Listyaningsih et al., 2020; Muhammad Saad, 2021; Mukhtarrija et al., 2017; Nur Budiman et al., 2022; Ode et al., 2022; Punomo, 2021; Widyana, 2022).

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak pada Pemilu 2019 dan pemilihan umum seterusnya didasarkan pada tiga pertimbangan utama: Pertama, untuk memperkuat rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945 terkait dengan sistem pemerintahan presidensial dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi *checks and balances*. Kedua, makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945 terhadap desain penyelenggaraan pemilu presiden adalah dilakukan serentak dengan pemilu legislatif. Ketiga, pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas (Ansori, 2019; Mukhtarrija et al., 2017).

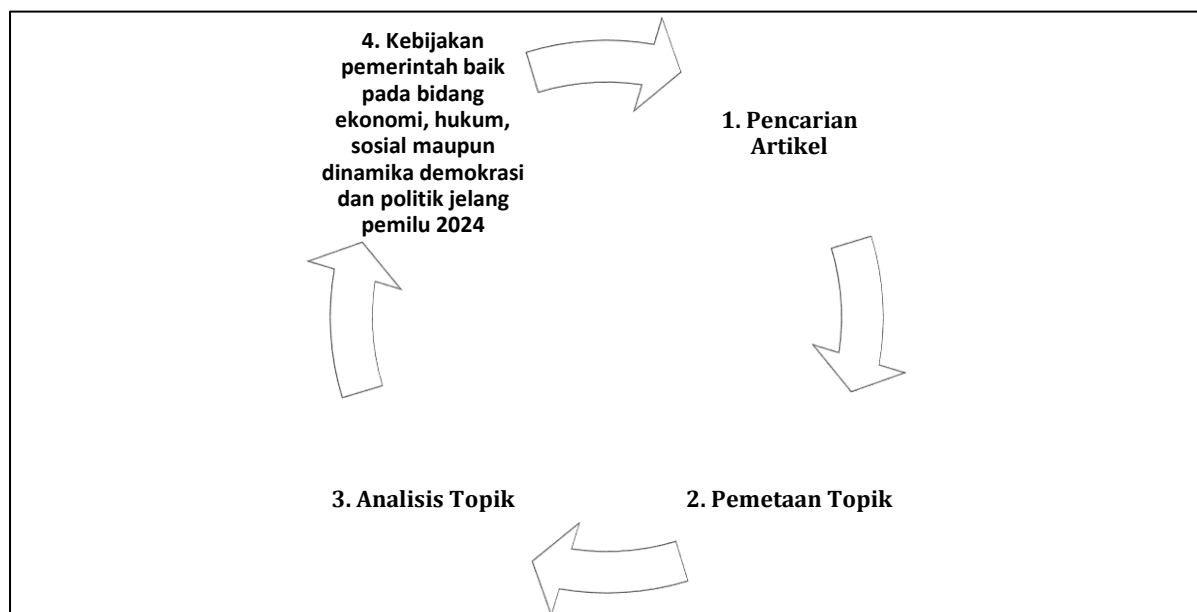
(Muhammad Saad, 2021) hasil riset mereka menjelaskan bahwa hadirnya partai baru pada pemilu yang bakal diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang tampaknya akan menjadi tahun politik yang berada dalam ambang batas kerawanan dan perpecahan, adapun strategi yang ampuh untuk meminimalisir perpecahan adalah dengan menanamkan sistem demokrasi internal partai, agar konflik internal antar anggota di dalam partai tidak terjadi kembali, kemudian tantangan lainnya

kata mereka adalah disrupsi akan membajak peran partai politik jika parpol enggan mengikuti arus disrupsi.

Lebih esensial ketika menggunakan cara pandang hukum, sangat relevan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Nurmandi et al., 2021; Punomo, 2021) menurutnya hubungan antara demokrasi, negara dan kebutuhan konstitusionalnya dimana ketiganya menjadi satu kesatuan sistemik dalam rangka memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis. Artinya jika di analisis secara substansial, maka antara dinamika politik yang terjadi hingga hari ini, kepentingan kelompok/ golongan kebijakan investasi dan perilaku korup para pejabat negara ini kemudian berakibat fatal terhadap formulasi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara maraton dalam suatu waktu (Mukhlis, 2021). Sehingga kedewasaan berpikir dengan segala asumsi dan keniscayaan mengindikasikan bahwa betapa rumitnya harapan menghadirkan pemimpin bangsa dan negara kedepan yang lebih akuntabel dan transparan memiliki penguasaan pemerintahan yang lebih memadai seperti yang dikemukakan di dalam pembentukan Mazhab Timoho, bahwa pengelolaan pemerintah harus ditempatkan pada posisinya masing-masing pemerintah secara individual paling tidak mampu memisahkan baik secara teori maupun praktik terkait re-orientasi *government*, *governing*, *governability*, *governance* dan *governmentality* (Santoso, 2020; Suwaryo, 2021; Yunanto & Tjahjoko, 2020; Yunanto, 2021).

METODOLOGI

1. Skema Proses peninjauan artikel



Kajian ini bermaksud mengkaji berbagai artikel yang memiliki korelasi kuat dengan kebijakan pemerintah baik pada bidang ekonomi, hukum, sosial maupun dinamika demokrasi dan politik jelang pemilu 2024. Artikel dengan skala dan reputasi internasional dan nasional menjadi sumber referensi utama dalam penyusunan penelitian ini (Mertz et al., 2020). Fokus kajian yang dibahas dalam

penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor dasar, terutama dalam mengetahui dan memahami konsep, dampak, dan pola yang terkait dengan kebijakan pemerintah baik pada bidang ekonomi, hukum, sosial maupun dinamika demokrasi dan politik jelang pemilu 2024.

Kajian-kajian yang telah diulas oleh peneliti sebelumnya coba dirangkum oleh peneliti dalam upaya menemukan benang merah untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah baik pada bidang ekonomi, hukum, sosial maupun dinamika demokrasi dan politik jelang pemilu 2024 berlangsung di era saat ini. Beberapa pertanyaan dasar yang dirangkum oleh peneliti dapat dijadikan dasar atau acuan untuk digunakan dalam menganalisis tema fundamental yang dilakukan.

Penelitian ini diawali dengan pencarian artikel menggunakan kata kunci kebijakan pemerintah baik pada bidang ekonomi, hukum, sosial maupun dinamika demokrasi dan politik jelang pemilu 2024 pada database Scopus dan Google Scholar periode 2015-2022 kemudian direview berdasarkan empat tahap, antara lain: 1) Pencarian artikel, 2) Pemetaan topik diskusi, 3). Analisis topik, dan 4). Analisis lebih lanjut dengan dukungan data-data kredibel yang telah di publikasikan oleh lembaga-lembaga survei kredibel (Asmussen & Møller, 2019; Mertz et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

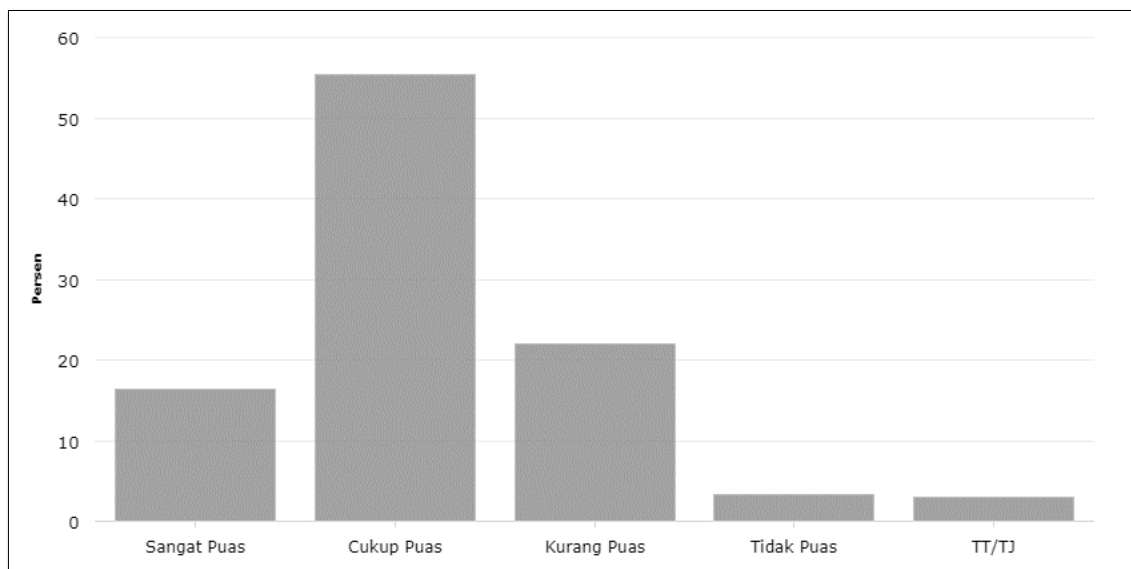
Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya diberbagai aspek terus mengalami pasang-surut, ini di akibatkan karena tingkat pemenuhan kebutuhan dinilai belum maksimal, artinya jika di dalam simulasi ekonomi disebutkan bahwa tuntutan akan pemenuhan kebutuhan tidak berbanding lurus dengan barang jasa yang tersedia atau dengan kata lain pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang dan terminologi lainnya yang sepadan dengan dinamika tersebut. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa prestasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode ke-2 pun ikut mengalami pasang surut sama dengan penilaian publik pada saat menjabat di periode-1. Namun yang menjadi pusat sorotan penilaian adalah lebih ke kinerja Presiden Jokowi-Ma-ruf di Periode ke-2 ini, sebab secara empiris dari semua aspek dinamikanya cukup kompleks, termasuk di antaranya adalah isu klasik penegakan hukum, kriminal, korupsi, kesenjangan pendidikan, ekonomi bahkan yang sangat mencekam adalah pada aspek kesehatan sejak mewabahnya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 silam seakan pemerintah kehilangan daya dalam menopang jiwa dan ekonomi bangsa (LSI, 2022).

Kepuasan atas Kinerja Presiden Presiden Jokowi Secara Umum

Kebijakan demi kebijakan terus diproduksi oleh pemerintah hingga ke akar rumput dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah yang sangat mematikan itu, namun media setiap hari update kasus. Kasus terjangkit dan meninggal akibat wabah itu pun terus meningkat. Walaupun belakangan pemerintah menemukan penangkal melalui jalan vaksinasi. Tapi kelihatannya publik tetap terpukul akibat gempuran fisik dan psikis yang menyertai wabah pandemi covid-19 tersebut. Bahkan sejumlah lembaga survei kredibel melakukan surevi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, salah satunya adalah lembaga Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) dari hasil surevi yang dirilis pada 26

Desember 2021 menyebutkan sekitar 71,7% responden publik merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sebagaimana disajikan melalui gambar grafik berikut ini:

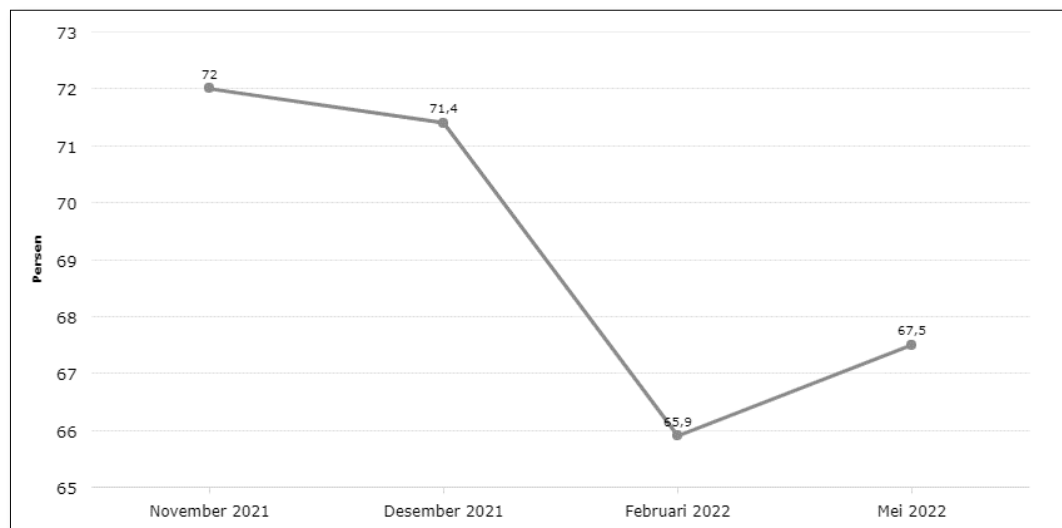
2.. Grafik Kepuasan Kinerja Presdien Jokowi secara Umum pada Akhir Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) skala penilaian sangat puas, cukup puas, kurang puas tidak puas dan tidak tahu atau netral, ditemukan 16,3% responden merasa sangat puas, dan 55,4% responden cukup puas. Kemudian responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 25,3%, selanjutnya ada 22% responden kurang puas, lalu 3,3% responden merasa sama sekali tidak puas dan ada sekitar 3% responden tidak memberikan jawabannya.

Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari hasil surveinya mengemukakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi cenderung stagnan, survey yang ia lakukan sejak November 2021 hingga Mei 2022 mencatat hanya 67,% masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi. sebagaimana disajikan melalui gambar grafik berikut ini:

3. Grafik Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Tahun 2022



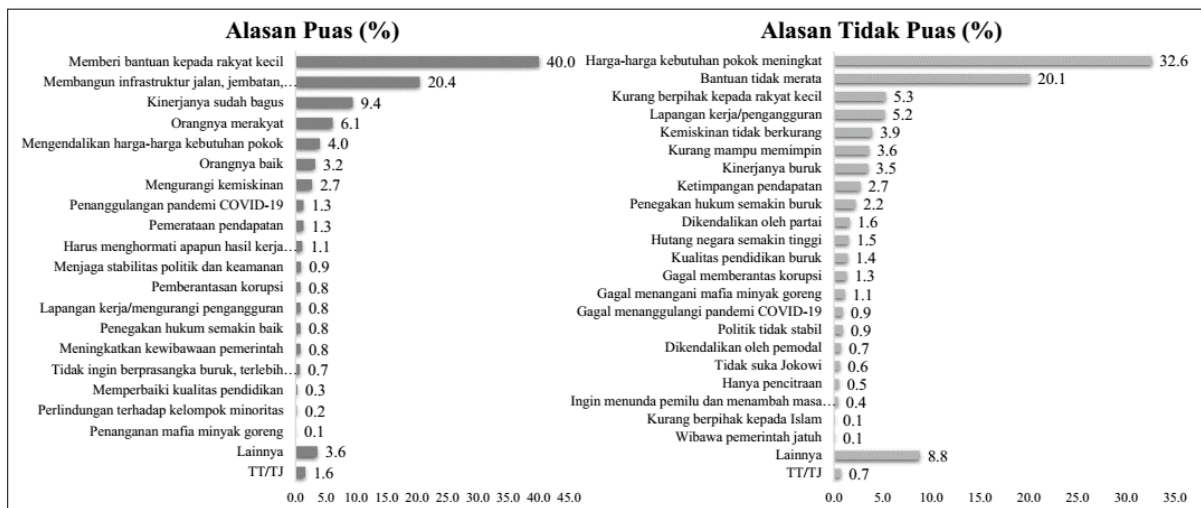
Garafik di atas menunjukkan bahwa pada November 2021 Kepuasan atas kinerja Jokowi sebanyak 72%. Kemudian mengalami penurunan pada Desember 2021 menjadi 71,4%, lalu pada Februari 2022 menjadi 65,9%, namun ada peningkatan sebanyak 67,5% pada Mei 2022.

Sejumlah fakta menarik untuk di analisis dari hasil kedua survei tersebut bahwa *pertama* temuan SMRC mengindikasikan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berdasarkan parameter terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dan Penangan Ekonomi artinya kinerja Presiden Jokowi asejalan dengan kepuasan responden terhadap penanganan Pandemi Covid-19, sebanyak 75% responden menyatakan sangat atau cukup puas dengan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya yang kurang atau tidak puas ada sekitar 22% dan 3% responden lainnya tidak menjawab, sementara pada aspek penanganan ekonomi berksar 60,1% responden yang merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja pemerintah terhadap upaya pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, lalu 34,7% responden kurang atau tidak puas dan 5,2% responden lainnya tidak memeberikan jawaban.

Kedua temuan LSI jutru bervariasi bahwa berdasarkan demografi, masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi kebanyakan dari kalangan etnis sunda dan madura. Kemudian dari segi pendidikannya secara umum responden dari pendidikan tinggi hingga renda mayoritas merasa puas, selanjutnya dari sudut pandang wilayah, baik dari pedesaan maupun perkotaan mayoritas meras puas atas kinerja Jokowi, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat mengalami penurunan tingkat kepuasan di bandingkan dengan wilayah lainnya.

Terkait alasan kepuasan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi juga ternyata sangat bervariasi yaitu:

4. Grafik Alasan Puas dan Tidak Puas dengan Kinerja Presiden



Memberi bantuan kepada rakyat kecil mayoritas menjadi alasan masyarakat sehingga merasa puas terhadap kinerja Presiden dengan angka 40,0%, tingkat kepuasan berikutnya adalah dimasa pemerintahan Jokowi adanya peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan tingkat respon 20,4%, selanjutnya 9,4% menilai kinerja Presiden sudah bagus dan 6,1% orangnya pun

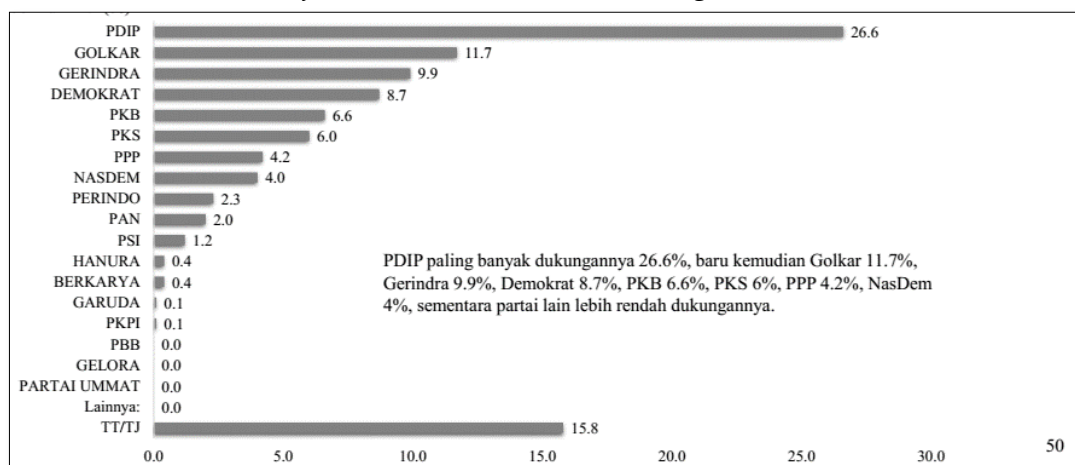
merakyatsebaliknya mayoritas yang tidak puas dikarenakan adanya kebijakan harga-harga keutuhan pokok meningkat dengan 32,6%, 20,1% menilai bahwa bantuan tidak merata, kemudian 5,3% masyarakat menilai bahwa presiden tidak berpihak kepada rakyat kecil dan 5,2% lapangan kerja/pengangguran kurang perhatian, selanjutnya kemiskinan tidak berkurang 3,9%, kurang mampu memimpin 3,6% serta 3,5% menilai bahwa kinerjanya buruk.

Dinamika Demokrasi Jelang 2024

Hipotesis terhadap dinamika demokrasi pra dan pasca Pemilihan Umum 2024 sesuai pengamatan dan analisa penulis kemungkinan terjadinya perubahan dan peningkatan praktik demokrasi, ekonomi, politik, transformasi penegakan hukum dan pemerintahan serta seluruh aspek lainnya ke arah yang lebih baik masih cukup berat. Jika kita *flashback* kinerja Presiden Jokowi baik pada periode pertama maupun periode kedua, beserta dengan gerakan dan dinamika politik yang berkembang hingga hari ini, maka pesimisme bangsa terhadap pemimpin bangsa mendatang akan tetap ada.

Perangkat-perangkat yang bisa dijadikan ukuran antara lain adalah pelembagaan dan kemajemukan perkembangan Partai Politik memiliki keterbatasan terhadap pengaturan angka ambang batas Partai Politik dalam mengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai bunyi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Pasangan calon di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Artinya jika kebijakan tersebut tidak mengalami perubahan sebelum memasuki tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2024 mendatang, maka bisa dipartikan bahwa tampuk kekuasaan negara kedepan tetap bakal di duduki oleh kalangan elit oligarki, hipotesa ini sejalan dengan hasil survei yang dipublikasi oleh LSI per 13-21 Agustus 2022, disebutkan bahwa Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) tetap berada di urutan pertama dengan respon sebanyak 26,6%, disusul Partai Golkar 11,7%, dan di urutan ketiga ditempati Partai Gerindra dengan 9,9% responden.

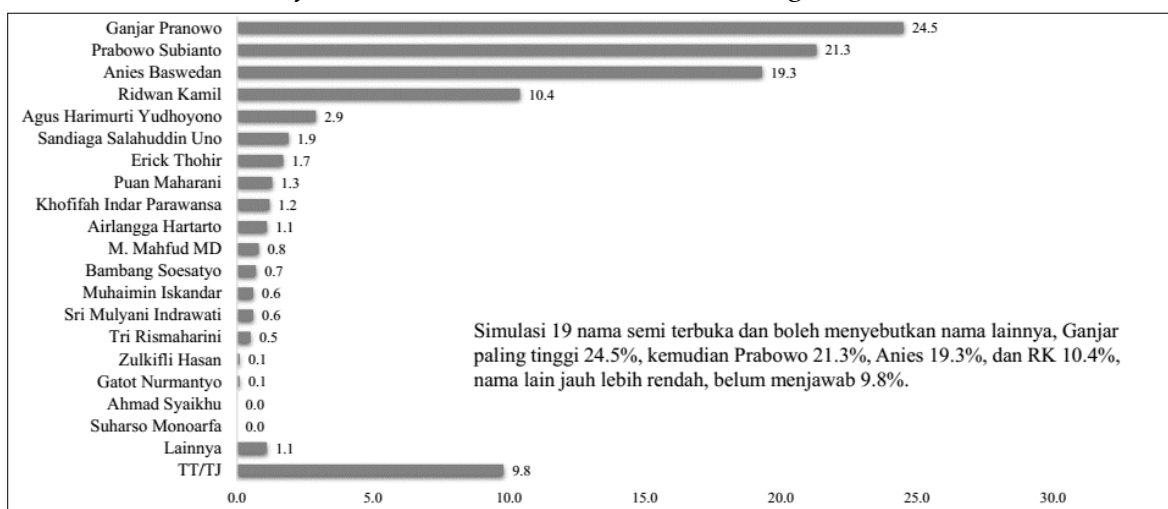
5. Grafik Pilihan Partai Politik Jelang Pemilu 2024



Selain 3 (tiga) partai besar yang telah di uraikan sebelumnya, grafik di atas pun secara berurutan menempatkan sejumlah partai elit berpotensi melakukan koalisi dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden mendatang, antara lain Partai Demokrat yang berada diposisi berikutnya dengan 8,7%, PKB 6,6%, PKS 6%, PPP 4,2%, Nasdem 4% sementara PAN dan sejumlah partai lainnya masih sangat minim dukungan.

Tetapi pada simulasi bakal Calon Presiden LSI, merilis sejumlah nama kepala Daerah meskipun secara mereka memiliki keterikatan dengan partai tetapi, dari aspek kapasitas kepemimpinan dan elektabilitas jika diarahkan pada 2 pilihan maka, tentu publik punya harapan untuk menatap masa depan bangsa dan negara kedepan yang lebih baik dengan *flashback* pada *track record* kinerja dan *legacy* kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala daerah, ketimbang dengan elit-elit oligarki, penguasa partai yang terkontaminasi dengan ijon politik, investasi bisnis dan segala hal yang berpotensi mengarahkan kebijakan negara lebih berorientasi pada kepentingan kelompok maupun golongan ketimbang kepentingan umum.

6. Grafik Pilihan Bakal Calon Presiden Jelang Pemilu 2024



3 (Tiga) Kepala Daerah yang menjadi harapan publik untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia kedepan antara lain di posisi pertama adalah Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo dengan 24,9%, disusul Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan 20,1% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 10,9%. Kemudian dari kalangan elit politik termasuk ketua Partai Politik adalah Ketua DDP Partai Gerindra sekaligus rival abadi Jokowi selama 2 Periode yang kini menjadi pembantu Presiden, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengantongi 22,9% atau berada di urutan kedua setelah Ganjar Pranowo, elit politik yang berada diposisi kedua adalah ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dengan 3,1%, selanjutnya ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua DPP Partai Golkar masing-masing-masing 1,7% dan 1,1%. Sementara dari kalangan pengusaha ada nama Sandiaga Salahuddin Uno dengan 2,6% dan Erik Tohir sekaligus Menteri BUMN kabinet Jokowi-Ma'ruf dengan respon 2,4%.

Kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi secara umum dan dinamika demokrasi jelang 2024 sebagaimana telah di uraikan di atas paling tidak menjadi parameter mengurai problematisasi kehendak politik, ekonomi, hukum dan aspek lainnya (Koch & Buch-Hansen, 2021) dalam proses penentuan pemimpin yang dinilai cakap dan tepat dalam mengendalikan tata kelola pemerintahan, mengendalikan kepentingan serta perkembangan dan kemajuan negara kedepan.

KESIMPULAN

Dinamika perjalanan demokrasi dan politik pra dan pasca pemilu tahun 2024 mendatang penuh warna selain kehadiran sejumlah partai baru, disrupsi politik bakal menjadi penialain tersendiri terhadap seluruh elite dan partai politik untuk menaiki semaraknya panggung demokrasi 5 tahunan tersebut. Kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode, seharusnya mampu meminimalisir kemungkinan-kemungkinan anomali demokrasi dan meninggalkan *legacy* yang mampu dikenang secara positif. Namun kecenderungannya malah menimbulkan pro-kontra secara maroton dalam suatu waktu, selama ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, justru stagnan dan cenderung menurun. Hal yang kelihatannya sangat sulit untuk dikendalikan adalah soal invertasi dan kebijakan ekonomi.

Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 terus menjadi alasan mendasar dalam mendistribusikan batuan ekonomi kepada masyarakat luas, tetapi di saat yang bersamaan bantuan-bantuan tersebut tak luput dari retorika bisnis, terjaring dan termanivestasi terhadap pelembagaan-pelambagaan liberalisasi, kapitalisasi dan feodalisasi sehingga harapan untuk mengadirkan pemimpin yang berjiwa visioner, memiliki keberpihakan terhadap penyelesaian persoalan mendasar bangsa hanyalah bersifat semu. Untuk itu kajian ini memberikan penegasan secara normatif lemahnya kehadiran pemerintah dalam tubuh dan prinsip berbangsa dan bernegara, secara esensial logika ini tercermin melalui pembacaan geopolitik dan teori praktik ekonomi politik, yang berimplikasi terhadap dinamika kebijakan ekonomi melalui salah kaprah praktik investasi ekonomi dan keterikatan terhadap impikasi lainnya adalah praktik politik yang dari hari ke hari semakin memperkeruh hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi dan menimbulkan kabut tebal kedaulatan. Sehingga harapannya adalah kajian berikutnya lebih mendalami kriteria-kriteria proporsional dalam penentuan pencalonan eksekutif dan legislatif.

REFERENSI

- Ansori, L. (2019). *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*. 4(1), 15-27.
- Asmussen, C. B., & Møller, C. (2019). Smart Literature Review: a Practical Topic Modelling Approach to Exploratory Literature Review. *Journal of Big Data*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0255-7>
- Bansal, M. (2020). *Cardiovascular disease and COVID-19*. January.
- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1-13.

<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>

- Cornelia Evelin Cabui. (2022). Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan. *Jurnal Adhikari*, 1(4), 221-225. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i4.51>
- Fasano, A., Antonini, A., Katzenschlager, R., Krack, P., Odin, P., Evans, A. H., Foltynie, T., Volkman, J., & Merello, M. (2020). Management of Advanced Therapies in Parkinson's Disease Patients in Times of Humanitarian Crisis: The COVID-19 Experience. *Movement Disorders Clinical Practice*, 7(4), 361-372. <https://doi.org/10.1002/mdc3.12965>
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987>
- Goris Seran, G. (2017). Designing Model of Concurrent Local Executive Election: The Case of Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 36(2), 93-109. <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>
- Hamdanny, D. R., & Mukhtar, K. (2021). Wacana Poros Partai Islam untuk PILPRES 2024: Politik Identitas atau Penggalangan Suara Oposisi? *Politea*, 4(2), 190. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11735>
- Kiky, A. N. E. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169-188. <https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60>
- Koch, M., & Buch-Hansen, H. (2021). In Search of a Political Economy of the Postgrowth Era. *Globalizations*, 18(7), 1219-1229. <https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1807837>
- Listyaningsih, E., Sariningsih, E., & Mudrikah, R. (2020). Stock Market Reaction to Indonesia Presidential and Legislative Election. *Binus Business Review*, 11(2), 91-96. <https://doi.org/10.21512/bbr.v11i2.6302>
- LSI. (2022). *Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024* (Issue 40).
- Maslihan. (2017). Teori Pendekatan Ekonomi dalam Politik Internasional. *STTM Karya Jurnal STTIETribuana*, 13-24.
- Mertz, M., Nobile, H., & Kahrass, H. (2020). Systematic Reviews of Empirical Literature on Bioethical Topics: Results from a Meta-Review. *Nursing Ethics*, 27(4), 960-978. <https://doi.org/10.1177/0969733020907935>
- Muhammad Saad, D. F. S. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 15-37. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>

- Mukhlis, S. A. N. S. (2021). Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e- Government di Indonesia. *Journal of Government Insight*, 1(2), 84-91. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 644-662. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>
- Nainggolan, P. P. (2016). Peran Kapital dan Gagalnya Konsolidasi Demokratis Indonesia: Pendekatan Ekonomi-Politik. *Jurnal Politica*, VII(1), 1-24.
- Nur Budiman, B., Dewi Safitri, B., Rizki Putriga, B., & Julietta Imanuella Wicaksono, V. (2022). Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov*, 4(1), 211-243. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>
- Nurmandi, A., Lutfi, M. S., & Qodir, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49-61. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Ode, S., Dalupe, B., Regif, S. Y., & Jannah, D. Al. (2022). *Journal of Political Issues Pemilu dan COVID - 19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020*. 4, 29-41.
- Powell, P. B. B. (2021). The Political Economy of the Covid-19 Pandemic. *Southern Economic Journal*, 87, 1090-1106.
- Prabowo, A. R. E. R. C. (2021). Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024. *Jurnal Oratio Directa*, 3(1), 6.
- Punomo, S. E. P. (2021). Relasi Perwakilan , Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Government*, 1, 25-37. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332-346. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1052%0Ahttps://dinastirev.org/JIHHP/article/download/1052/648>
- Santoso, P. (2020). The Probing: Berkedaulatan Rakyat dengan Hikmat. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(2), 187-206. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.88>
- Suwaryo, U. (2021). Ilmu Pemerintahan Dalam Praktek: Perspektif Erofa Kontinental. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 21-32. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.106>
- Widyana, M. R. (2022). Strategi Partai Gelora Sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 Untuk Memenuhi Parliamentary Threshold. *Jurnal PolGov*, 4(1), 125-168.

<https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3861>

Yunanto, S E, & Tjahjoko, G. T. (2020). Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta* ..., 1, 143-166.

<https://scholar.archive.org/work/d7cuf5n4ofeflfovybin42qx3i/access/wayback/http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/download/90/44>

Yunanto, Sutoro Eko. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1-20.

<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>

Zimmermann, M., & Nkenke, E. (2020). *Approaches to the management of patients in oral and maxillofacial surgery during COVID-19 pandemic. January.*